

Rekonstruksi *Civic Virtue* Digital Berbasis *Piil Pesenggiri* dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia

Ahmad Nur' Afief Dwianugraha ^{a,1*}, Yayuk Hidayah ^{a,2}, Suyato ^{a,3}, Sumantin Sitorus ^{a,4},
Puji Wulandari Kuncorowati ^{a,5}

^a Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ ahmadnurafief.2025@student.uny.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 26 November 2025;

Revised: 8 Desember 2025;

Accepted: 24 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Piil Pesenggiri;
Civic Virtue;
Disrupsi Nilai;
Etnopedagogi;
Pendidikan
Kewarganegaraan.

Keywords:

Piil Pesenggiri;
Civic Virtue;
Value Disruption;
Ethnopedagogy;
Civic Education.

Era disrupsi nilai memicu krisis etika berupa disinformasi, polarisasi, dan degradasi moral yang mengancam stabilitas sosial. Tantangan ini diperburuk oleh dominasi perspektif Barat dalam pendidikan kewarganegaraan digital yang kurang menyentuh akar budaya lokal. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka kerja pendidikan kewarganegaraan digital berbasis etnopedagogi *Piil Pesenggiri* sebagai strategi mitigasi disrupsi nilai di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif studi pustaka, ditemukan bahwa nilai-nilai *Juluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, dan *Sakai Sambayan* dapat direkonstruksi menjadi fondasi *civic virtue* digital meliputi integritas identitas, etika komunikasi empatis, partisipasi inklusif, dan kolaborasi kolektif yang bertanggung jawab. Hasil kajian menunjukkan internalisasi kearifan lokal Lampung ini berfungsi sebagai "benteng moral" yang menjembatani identitas digital dengan nilai sosial masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi etnopedagogi ini sangat krusial untuk membangun karakter warga digital yang bertanggung jawab sekaligus membumikan nilai-nilai luhur keindonesiaan dalam ekosistem global yang homogen demi penguatan identitas nasional yang berkelanjutan di masa depan secara komprehensif utuh.

ABSTRACT

Reconstruction of Digital Civic Virtue Based on Piil Pesenggiri in Pancasila and Civic Education Learning in Indonesia. The era of value disruption has triggered an ethical crisis characterized by disinformation, polarization, and moral degradation that threatens social stability. This challenge is exacerbated by the dominance of Western perspectives in digital citizenship education, which fails to address the roots of local culture. This study aims to formulate a framework for digital citizenship education based on the Piil Pesenggiri ethnopedagogy as a strategy to mitigate value disruption in Indonesia. Through a qualitative literature review, it was found that the values of Juluk Adek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, and Sakai Sambayan can be reconstructed as the foundation of digital civic virtue, encompassing identity integrity, empathetic communication ethics, inclusive participation, and responsible collective collaboration. The study's findings indicate that the internalization of this local wisdom from Lampung functions as a "moral bulwark" that bridges digital identity with societal values. The study's conclusion emphasizes that this ethnopedagogical reconstruction is crucial for fostering responsible digital citizenship while grounding Indonesia's noble values within a homogenized global ecosystem thereby comprehensively strengthening sustainable national identity for the future.

Copyright © 2025 (Ahmad Nur' Afief Dwianugraha, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Dwianugraha, A. N., Hidayah, Y., Suyato, Wulandari Kuncorowati, P. ., & Sitorus, S. (2025). Rekonstruksi Civic Virtue Digital Berbasis Piil Pesenggiri dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(8), 332–343. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i8.4304>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya berhenti pada literasi digital, melainkan dapat menyentuh tiga aspek fundamental kewarganegaraan yakni *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*. Akan tetapi, mayoritas kajian pendidikan kewarganegaraan digital masih didominasi oleh paradigma barat yang sering mengabaikan keberagaman nilai dan sistem etika masyarakat lokal. Dalam praktiknya, fokus Barat pada aspek teknis dan hukum saja kurang memperhatikan konteks kebudayaan, sehingga nilai-nilai kerja sama dan tanggung jawab bersama sulit terinternalisasi tanpa basis kearifan lokal. Krisis ini menegaskan betapa pentingnya *digital citizenship* diadaptasi melalui kontekstualisasi nilai-nilai lokal agar karakter digital dapat terbentuk dan tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Era digital yang semakin maju, telah membawa masyarakat dunia menuju era disrupsi digital yang memunculkan krisis etika yang ditandai oleh penyebaran disinformasi, penyalahgunaan data, dan kekerasan daring yang dapat berdampak luas, tidak hanya pada individu tetapi juga pada stabilitas sosial dan keamanan nasional suatu negara (Permana et al., 2023; Surjatmodjo et al., 2024).

Disinformasi dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga atau institusi pemerintah, dan merugikan proses demokrasi, serta memengaruhi opini publik (Reisach, 2021). Oleh karena itu, *digital citizenship* perlu dipahami sebagai konsep multidimensional yang terhubung dengan konteks sosial dan budaya lokal. Etika digital melibatkan tanggung jawab yang mendalam untuk menyebarkan informasi yang akurat, menjaga kualitas komunikasi dan interaksi daring, serta kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari penggunaan teknologi digital (Sari et al., 2024). Selain itu, media sosial berkontribusi terhadap polarisasi dan degradasi etika komunikasi, di mana interaksi digital sering mengabaikan norma sosial dan budaya (Dwiputra et al., 2022). *Digital citizenship* oleh sebab itu perlu dipahami sebagai konsep multidimensional yang terhubung dengan konteks sosial dan budaya lokal.

Era disrupsi digital global telah memunculkan krisis kewarganegaraan yang serius (Hensmans, 2021; Weigl et al., 2024). Berdasarkan dari penelitian Singh & Kumar, (2025) terdapat adanya “*growing ethical tensions*” di lingkungan digital, seperti erosi privasi, bias algoritma, jurang digital (*digital divide*), dan rekonstruksi hubungan sosial. Di saat yang sama, gelombang disinformasi di media sosial mengancam daya kritis warga digital karena ketajaman berpikir mereka di era digital semakin terancam oleh misinformasi. Media sosial justru memicu polarisasi: konten algoritma yang provokatif memperkuat polarisasi dan mengubah interaksi sosial menjadi pertentangan “*adversarial*” antarkelompok. Akibatnya, norma-norma moral tradisional menjadi tidak stabil; kepercayaan masyarakat mengalami penurunan; sikap saling curiga semakin meningkat; dan etika di ruang siber mengalami degradasi (*moral erosion*) (Meythaler et al., 2023). Sayangnya, kerangka pendidikan kewarganegaraan digital (*digital citizenship education*) saat ini masih didominasi perspektif Barat. Ardiansyah et al, (2026) mengkritik bahwa pendidikan kewarganegaraan digital global masih didominasi oleh epistemologi Barat yang sering mengabaikan keberagaman nilai dan sistem etika masyarakat lokal.

Pendekatan universal dan berwajah netral tersebut berisiko melepaskan pendidikan kewarganegaraan digital dari akar filosofis komunitas setempat. Akibatnya, prinsip-prinsip kewarganegaraan universal cenderung terasa “kering” dan kehilangan resonansi budaya ketika tidak diintegrasikan dengan identitas lokal. Dalam praktiknya, fokus Barat pada aspek teknis dan hukum saja kurang memperhatikan konteks kebudayaan, sehingga nilai-nilai kerja sama dan tanggung jawab bersama sulit terinternalisasi tanpa basis kearifan lokal. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan kewarganegaraan digital yang membumikan nilai-nilai lokal agar pendidikan karakter digital lebih bermakna di masyarakat kita. Mayoritas kajian pendidikan kewarganegaraan digital masih sangat didominasi oleh paradigma Barat yang cenderung bersifat teknis-yuridis dan mengabaikan

keberagaman sistem nilai lokal. Belum ditemukan kerangka konseptual yang secara spesifik merekonstruksi falsafah hidup masyarakat Indonesia, khususnya dari perspektif etnopedagogi, sebagai instrumen mitigasi disrupsi nilai di ruang siber.

Provinsi Lampung menawarkan akar budaya yang relevan. *Piil Pesenggiri* bukan sekadar nilai tradisi, melainkan falsafah hidup dinamis masyarakat Lampung yang sampai kini memandu perilaku sosial. Istilah *piil* berarti harga diri, *pesenggiri* kehormatan secara utuh menjadi panduan tatanan sosial untuk menjaga harmonisasi, kesejahteraan, dan keadilan. Empat nilai utamanya *Juluk Adek* (tahu malu dan menjaga kehormatan), *Nemui Nyimah* (keramahan/tolong-menolong), *Nengah Nyappur* (membantu dalam kepemimpinan), dan *Sakai Sambayan* (gotong-royong) mengandung prinsip *civic virtue*. *Piil Pesenggiri* bahkan digambarkan sebagai “benteng moral” masyarakat Lampung: falsafah ini membatasi individu dari tindakan tercela (curang, mencuri, mengkhianati) demi mempertahankan harga diri dan nama baik keluarga serta komunitas. Dengan kata lain, nilai-nilai ini secara inheren mengajarkan tanggung jawab sosial, integritas, dan tolong-menolong esensi *civic virtue* yang universal, namun berakar kuat pada budaya lokal Lampung (Fachruddin & Suharyadi, 1997; Sakti et al., 2024; Syahputra & Ruslan, 2021).

Pikiran utama artikel ini adalah merekonstruksi nilai *Piil Pesenggiri* ke dalam dinamika digital, bukan sekadar memindahkan norma lama ke platform baru. Sebagai contoh, semangat *Sakai Sambayan* (gotong-royong) diinterpretasikan ulang sebagai prinsip kolaborasi digital kolektif. Konsep *gotong-royong era digital* ini telah diwujudkan, misalnya, dalam berbagi data peringatan bencana secara daring yang memperkuat kesiapsiagaan publik. Demikian pula, *Nemui Nyimah* (keramahan) diadaptasi menjadi etika komunikasi di media sosial yang penuh empati dan saling menghargai lawan bicara. Prinsip *Juluk Adek* mendorong warga digital menjaga sopan-santun meski dalam ruang anonim. Kurikulum kewarganegaraan digital sebaiknya kontekstual dan berbasis nilai lokal. Integrasi tersebut sejalan dengan temuan (Ardiansyah et al., 2026) bahwa menggabungkan nilai lokal seperti kerja sama, musyawarah, dan kesantunan budaya dalam pendidikan digital *memperkuat* tanggung jawab sipil dan ketahanan demokrasi. Dengan pemahaman ini, *Piil Pesenggiri* direkontekstualisasikan untuk merumuskan *civic virtue* baru yakni gotong-royong digital, keramahan *online*, dan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis etnopedagogi *Piil Pesenggiri* sebagai strategi mitigasi disrupsi nilai dalam membangun karakter warga digital Indonesia yang berintegritas secara komprehensif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Desain penelitian difokuskan pada telaah konseptual melalui prosedur *conceptual framework building* untuk merekonstruksi nilai-nilai etnopedagogi ke dalam bingkai kewarganegaraan digital. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis yang dilakukan melalui prosedur sinkronisasi nilai secara sistematis. Proses ini melibatkan pemetaan esensi falsafah *Piil Pesenggiri* ke dalam indikator *civic virtue* digital guna memastikan bahwa transformasi nilai tradisional ke dalam dinamika modern berjalan secara organik dan tetap berpijak pada akar budaya asli. Tahapan analisis dilakukan secara terstruktur meliputi reduksi data literatur, kategorisasi nilai-nilai *Juluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, dan *Sakai Sambayan*, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin objektivitas dan validitas analisis pustaka, penelitian ini menerapkan instrumen triangulasi sumber data. Hal ini dilakukan dengan memverifikasi secara silang temuan dari berbagai literatur sekunder, yang meliputi artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science), jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-3), buku referensi otoritatif mengenai falsafah *Piil Pesenggiri*, serta dokumen kebijakan terkait pendidikan

kewarganegaraan digital. Dengan rentang waktu publikasi 10 tahun terakhir (2016–2026), proses verifikasi ini memastikan aktualitas data serta meminimalisir subjektivitas dalam merumuskan kerangka baru *civic virtue* digital.

Hasil dan Pembahasan

Era disrupsi digital telah membawa transformasi signifikan dalam ekosistem informasi global, di mana produksi dan distribusi informasi tidak lagi dimonopoli oleh institusi formal, melainkan terbuka bagi setiap individu melalui platform digital. Meskipun kondisi ini memperluas akses informasi dan memperkuat demokratisasi komunikasi, fenomena tersebut juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya disinformasi dan polarisasi sosial serta dapat memanipulasi narasi yang secara sistematis memengaruhi persepsi publik dan mengganggu stabilitas serta dapat merusak proses demokrasi secara fundamental (Adebayo Yusuf Balogun et al., 2025; Hashemi, 2023; Sun et al., 2023). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sari et al, (2024) bahwa Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah penyebaran berita palsu dan disinformasi yang dapat merusak proses demokrasi, memicu kebencian, serta memengaruhi pandangan publik terhadap isu-isu penting. Dampak destruktif ini tidak hanya berhenti pada ranah institusional, melainkan juga menyasar ranah personal, di mana penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi dapat memberikan dampak negatif bagi individu dan masyarakat (Hoes et al., 2024). Arsitektur algoritma pada platform media sosial turut memperburuk krisis dengan lebih mengutamakan viralitas dibandingkan dengan kebenaran. Konten yang memicu kemarahan, kontroversi, atau konflik partisan memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipromosikan, tanpa memperhatikan akurasinya (Shin & Shin, 2026). sehingga menciptakan ekosistem informasi yang bias. Oleh karena itu, penggunaan sumber yang terpercaya menjadi sangat krusial untuk membangun penggunaan digital yang berlandaskan moralitas serta hukum.

Dengan adanya mekanisme tersebut mengakibatkan peningkatan polarisasi sosial di mana masyarakat terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang saling bertentangan (Ali & Eriyanto, 2021). Hal ini diperburuk oleh fenomena *echo chambe* yang mempersempit perspektif dan menurunkan kemampuan berpikir kritis. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengikis kohesi sosial dan memperlemah fondasi demokrasi (Jost et al., 2022). Krisis ini menggambarkan bahwa degradasi moral yang semakin kompleks yang ditandai dengan menurunnya etika, maraknya *cyberbullying*, penyebaran misinformasi serta rendahnya tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. (Permana et al., 2023) Lebih lanjut, degradasi moral digital juga terlihat dari menurunnya kualitas komunikasi dalam ruang digital (Avalle et al., 2024). Media sosial sering kali menjadi ruang di mana individu mengekspresikan diri tanpa mempertimbangkan norma kesantunan dan etika komunikasi (Marelić et al., 2024). Anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital memperkuat perilaku ini, karena individu merasa tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap tindakan mereka (Mane et al., 2025). Akibatnya, komunikasi yang terjadi sering kali bersifat agresif, tidak sopan, dan merusak hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa etika komunikasi dalam media sosial sering diabaikan, yang mengakibatkan degradasi budaya dalam hal berbicara. Di sisi lain, isu privasi juga merupakan aspek penting dalam degradasi moral digital. Dalam era *big data*, informasi pribadi menjadi komoditas yang bernilai tinggi dan rentan disalahgunakan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi membuat mereka mudah menjadi korban eksploitasi digital. Oleh karena itu, etika digital menjadi sangat penting sebagai landasan dalam mengatur perilaku individu dalam ruang digital. Sebagai upaya membumikan landasan etis tersebut agar lebih aplikatif dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia, nilai-nilai kearifan lokal menawarkan fondasi moral yang relevan.

Piil Pesenggiri dalam konteks tersebut hadir sebagai falsafah hidup masyarakat Lampung yang memiliki kedudukan fundamental sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial secara mendalam. *Piil Pesenggiri* merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung yang memiliki kedudukan fundamental sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial (Suwardi & Dinata, 2021). Secara etimologis, *piil* merujuk pada harga diri, sedangkan *pesenggiri* berarti kehormatan atau martabat (Isdiyanto et al., 2023). Kedua konsep ini membentuk suatu kesatuan nilai yang berfungsi sebagai pedoman etika dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif (Nurdin & Utami, 2023). Dalam konteks sosial, *Piil Pesenggiri* tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Sasongko et al., 2022). Dengan demikian, falsafah ini memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni sosial, menjaga keadilan, serta memperkuat kohesi komunitas (Handayani et al., 2021).

Jika dibedah lebih dalam melalui perspektif akademik, kontribusi nyata dalam menjaga kebersamaan ini sebenarnya merupakan perwujudan dari *civic virtue*, yaitu seperangkat nilai moral yang mendasari perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat (Masitoh, 2019). *Civic virtue* menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, integritas, kepedulian terhadap kepentingan bersama, dan partisipasi aktif dalam kehidupan publik (Ahmadin et al., 2026). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kewarganegaraan, termasuk dalam konteks digital, tidak hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban formal, tetapi juga mencakup dimensi etika dan moral yang melekat dalam kehidupan sehari-hari (Manik & Samsuri, 2021). Oleh Sebab itu, *Piil Pesenggiri* memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan etis dalam membangun kewarganegaraan digital yang kontekstual. *Piil Pesenggiri* selain itu juga dapat berfungsi sebagai “benteng moral” yang membatasi individu dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam masyarakat Lampung, pelanggaran terhadap nilai-nilai *Piil Pesenggiri* tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas secara keseluruhan (Rimanto et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki dimensi kolektif yang kuat, di mana kehormatan individu terkait erat dengan kehormatan komunitas.

Tabel 1. Sintesis Rekonstruksi *Piil Pesenggiri* dalam *Civic Virtue* Digital

No.	Nilai <i>Piil Pesenggiri</i>	Nilai Kewarganegaraan (<i>civic virtue</i>)	Perilaku digital yang diharapkan
1	<i>Juluk Adek</i> (Menjaga nama baik dan kehormatan)	Integritas dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari perilaku toksik dibalik akun anonim seperti <i>cyberbullying</i> • Menjadikan unggahan atau postingan sebagai cerminan martabat diri
2	<i>Nemui Nyimah</i> (Keramahan dan sopan santun)	Empati dan Etika komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menolak penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian • Berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan menghargai lawan bicara
3	<i>Nengah Nyappur</i> (Keterbukaan dan Membaur)	Partisipasi Inklusif dan Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai perbedaan pendapat (<i>diversity of thought</i>) di ruang digital. • Bertransformasi dari penonton postingan, menjadi lebih kreatif dan membuat dan men-<i>share</i> konten-konten positif yang bermanfaat buat orang lain
4	<i>Sakai Sambayan</i> (Tolong-Menolong dan Gotong Royong)	Kolaborasi Kolektif dan Solidaritas	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>open collaboration</i> untuk kebaikan bersama. • Terlibat dalam aksi kolektif sosial daring seperti donasi.

Era digital ini, nilai menjadi sangat relevan untuk mengatasi fenomena degradasi moral yang ditandai oleh rendahnya etika komunikasi dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital (Nurdin & Utami, 2023). Dalam konteks ruang digital, saat ini identitas asli sering kali bersifat anonim. Hal tersebut memicu perilaku buruk di dunia digital dan hilangnya batas privasi. Dalam kondisi ini, falsafah *Piil Pesenggiri* tidak hanya sekedar ciri khas, tetapi juga dapat menjadi benteng moral. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pengingat dari dalam individu untuk mencegah seseorang berbuat tindak kejahatan di dunia maya. Falsafah ini dapat menyadarkan warga digital bahwa apa pun yang mereka lakukan di dunia digital walaupun menggunakan akun anonim pada akhirnya akan berdampak bagi harga diri dan martabat mereka di dunia nyata. Perubahan ini menggeser fokus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembelajaran tidak lagi sekedar bergantung pada aturan hukum dan ancaman sanksi yang kaku, melainkan lebih mengutamakan tumbuhnya kesadaran moral dari dalam diri individu itu sendiri secara alami. Untuk memperjelas bagaimana kearifan lokal ini diterapkan menjadi wujud perilaku di dunia maya, ringkasan hubungannya disajikan pada Tabel 1.

Piil Pesenggiri tidak hanya dilihat sebagai manifestasi dari identitas budaya lokal, tetapi juga menyimpan prinsip-prinsip universal yang relevan dengan konsep kewarganegaraan. *Juluk Adek* dalam hal ini, berfungsi sebagai fondasi identitas digital yang dalam tatanan masyarakat Lampung berperan dalam mendorong individu untuk memelihara nama baik serta menghindari perbuatan yang mencoreng harga diri. Di tengah dinamika ruang digital, prinsip ini dapat direvitalisasi menjadi kesadaran dalam mengelola identitas digital secara bertanggung jawab, di mana setiap jejak digital dapat mulai dari unggahan hingga interaksi *online* dianggap sebagai cerminan martabat diri (*Piil*). Budaya malu yang secara inheren melekat dalam *Juluk Adek* yang berfungsi sebagai benteng moral untuk mencegah perilaku negatif di dunia digital seperti di dunia digital seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan konten-konten yang bersifat merusak moral yang sejalan dengan urgensi *values compass* dalam membentuk kefasihan etis (*values fluency*) generasi muda (Chambers et al., 2018). Lebih lanjut, internalisasi nilai ini terbukti memperkuat integritas dan tanggung jawab peserta didik atas segala tindakannya (Sinaga et al., 2024). Melalui rekonstruksi ini, kewarganegaraan digital dapat diubah menjadi komitmen dalam menjaga harkat dan martabat di ruang digital sekaligus menjadi strategi untuk mengatasi dominasi perspektif barat yang sering kali mengabaikan sistem etika dan nilai masyarakat lokal. Secara operasional *Juluk Adek* diintegrasikan untuk memperkuat dimensi profil pelajar Pancasila yang mandiri dan berakhlak mulia dengan menekankan pentingnya menjaga nama baik serta integritas moral serta setiap tindakan (Afif & Rahman, 2025). Aktivitas nyata di kelas dapat berupa guru memberikan tugas cek ulang media sosial mu baik postingan, komentar, dan *repostan*, pendidik meminta peserta didik untuk mengevaluasi unggahan di media sosial mereka untuk memastikan postingan tersebut mencerminkan martabat diri (*Piil*) dan tanggung jawab moral. *Juluk Adek* dapat dikaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui refleksi kejujuran dan tanggung jawab atas tindakan sendiri. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan indikator karakter integritas peserta didik terbukti mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 85% (Sinaga et al., 2024).

Selanjutnya selain aspek identitas, etika komunikasi digital yang empatik juga menjadi pilar utama melalui rekonstruksi nilai *Nemui Nyimah*. Nilai yang mengajarkan kesantunan terhadap tamu atau orang lain ini sangat relevan diimplementasikan sebagai dasar interaksi *online* untuk menanamkan nilai sikap saling menghormati di tengah mudarnya rasa empati pada media sosial. *Nemui Nyimah* dalam kerangka pengembangan etika komunikasi, menuntut warga digital untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri seperti penipuan (*fraud*), penyebaran konten hoaks, maupun perilaku yang merugikan lainnya (Sari et al., 2024). Manifestasi dari nilai ini mencakup komitmen untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka serta membangun hubungan yang positif, yang diperkuat dengan pandangan bahwa kearifan lokal dapat menjadi rujukan etis dalam membatasi cara melihat,

mendengar, dan berbicara di media digital (Sjafirah et al., 2024). Nilai *Nemui Nyimah* mengarahkan peserta didik pada etika dalam berkomunikasi yang berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengedepankan keramahan, sopan santun, dan keterbukaan. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis budaya melalui simulasi *role playing* di mana peserta didik mensimulasikan etika menerima tamu digital seperti menyambut anggota baru di grup media sosial atau menanggapi pesan asing secara santun. Bertujuan untuk membangun komunikasi yang empatik sehingga peserta didik mampu menghindari perilaku destruktif seperti provokasi dan penyebaran hoaks. Prinsip tersebut sesuai dengan upaya menghormati setiap privasi serta menolak tegas terhadap hoaks dan ujaran kebencian, di mana secara empiris internalisasi nilai ini terbukti meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mendengarkan perspektif orang lain secara santun (Sinaga et al., 2024).

Kualitas interaksi tersebut selanjutnya diperluas menjadi etika partisipasi digital yang inklusif melalui nilai *Nengah Nyappur*. Nilai yang mencerminkan sikap terbuka dan adaptif ini mendorong individu untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi juga bertransformasi menjadi produsen konten yang bertanggung jawab dalam membangun wacana publik yang sehat, sejalan dengan konsep kewarganegaraan digital yang menekankan keterlibatan aktif dan demokratis (Choi, 2016). Implementasi *Nengah Nyappur* memungkinkan warga digital untuk menghargai perbedaan pendapat sebagai bentuk kekayaan intelektual, di mana semangat berkumpul tanpa memandang latar belakang yang menjadi modal sosial yang penting untuk membangun budaya yang partisipasi yang menghargai keberagaman (Riadi, 2023). Terdapat korelasi konseptual antara pengetahuan vernakular berbasis kearifan lokal dengan kecakapan kewarganegaraan digital sebagai solusi atar perkembangan teknologi yang semakin tidak terkendali (Putra et al., 2024). Nilai *Nengah Nyappur* berperan penting dalam mengasah keterbukaan dan kemampuan peserta didik untuk bernalar kritis sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, terutama dalam menjaga etika dalam berinteraksi di ruang publik. Secara praktis, guru dapat menghidupkan nilai ini melalui kegiatan Kesepakatan Grup *Chat*, di mana seluruh peserta didik diajak bermusyawarah untuk menyusun aturan berkomunikasi yang sopan sebagai wujud nyata menghargai perbedaan pendapat. Hasil penelitian terdahulu, secara nyata internalisasi nilai ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dan kerja sama peserta didik secara signifikan hingga mencapai 78% (Sinaga et al., 2024), sehingga membekali generasi muda untuk menciptakan komunitas *online* yang harmonis di tengah arus disrupsi.

Sinergi dari berbagai dimensi partisipasi tersebut kemudian diakumulasikan ke dalam etika kolaborasi digital yang berakar pada nilai *Sakai Sambayan*. Nilai yang merefleksikan semangat gotong royong dan semangat saling memberi ini merupakan fondasi penting bagi pengembangan budaya kolaborasi di ruang digital. Hal tersebut memperlihatkan solidaritas kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bersama, di mana integrasinya ke dalam literasi digital dapat membangun lingkungan virtual yang etis (Ni'mah & Nurhidayati, 2025). Dalam nilai *Sakai Sambayan* mendorong semangat gotong royong dalam dunia digital sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat terlihat dalam kegiatan berbagi pengetahuan serta aksi kolektif dalam menyebarkan informasi tentang fenomena sosial seperti bencana, korban perang, dan lain sebagainya. Agar dampaknya lebih optimal, implementasi *Sakai Sambayan* dapat dikembangkan melalui berbagai strategi yang kreatif seperti *digital storytelling* dan gamifikasi hingga pembelajaran berbasis proyek (Sawitri, 2024). Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai lokal ini memiliki urgensi yang sangat penting sebagai dasar teoritis membangun etika dan karakter warga digital di tengah derasnya arus disrupsi nilai saat ini. Munculnya krisis etika ditandai dengan oleh maraknya disinformasi, polarisasi, serta degradasi moral yang semakin menegaskan kebutuhan akan sistem nilai yang dapat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang dalam pemanfaatan teknologi.

Menghadapi eskalasi disrupsi nilai saat ini, menunjukkan signifikansi yang kian krusial sebagai fondasi teoretis dalam mengonstruksi etika serta karakter kewarganegaraan digital. Krisis etika yang ditandai oleh meluasnya disinformasi, polarisasi, serta degradasi moral mempertegas kebutuhan akan sistem nilai yang mampu berperan sebagai instrumen penyeimbang dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini, *Piil Pesenggiri* menawarkan kerangka nilai yang tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga kontekstual dan aplikatif untuk diimplementasikan dalam dinamika kehidupan digital sehari-hari. Krisis etika yang ditandai oleh disinformasi, polarisasi, dan degradasi moral menunjukkan kebutuhan akan sistem nilai yang mampu menjadi penyeimbang dalam penggunaan teknologi (Fadia Puja Ainun et al., 2023; Meythaler et al., 2023). *Piil Pesenggiri* menawarkan kerangka nilai yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nilai-nilai lokal seperti *Piil Pesenggiri* dalam pendidikan kewarganegaraan digital dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan pendekatan universal yang cenderung abstrak dan kurang relevan dengan realitas sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti integritas, empati, partisipasi, dan gotong royong merupakan prinsip universal yang telah lama hidup dalam budaya lokal, sehingga lebih mudah diinternalisasi oleh masyarakat (Aries, 2022; Fadhillah Quratul ‘Aini et al., 2024). Dalam hal ini, *Piil Pesenggiri* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat direkonstruksi untuk menjawab tantangan era digital. Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga dapat memperkuat identitas budaya dalam menghadapi arus globalisasi yang cenderung homogen.

Integrasi nilai lokal dalam pendidikan digital merupakan urgensi fundamental untuk membentuk warga negara yang kompeten sekaligus memiliki akar karakter budaya yang kuat di tengah akselerasi perubahan sosial. Dalam konteks ini, rekonstruksi etnopedagogi melalui transformasi nilai *Sakai Sambayan* menjadi "gotong royong digital" merupakan langkah strategis untuk membangun *civic virtue* digital yang berbasis pada semangat kolaborasi. Sejalan dengan paradigma kewarganegaraan digital, partisipasi aktif menjadi determinan utama dalam mewujudkan masyarakat digital yang inklusif dan demokratis, di mana individu tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi, melainkan bertransformasi menjadi kontributor yang bertanggung jawab. Solidaritas kolektif ini terbukti menjadi solusi krusial dalam menghadapi tantangan global melalui praktik *open collaboration*, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integritas individu dalam mencegah penyalahgunaan teknologi dan penyebaran disinformasi. Dalam perspektif *digital citizenship*, partisipasi aktif merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat digital yang inklusif dan demokratis (Örtegren, 2024; Suherlan, 2023). Individu tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen dan kontributor yang bertanggung jawab (Hödl & Myrach, 2023). Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kewarganegaraan digital merupakan konsep multidimensional yang melibatkan keterlibatan aktif dalam kehidupan publik, baik secara daring maupun luring (Choi, 2016).

Dengan demikian, rekonstruksi *Sakai Sambayan* sebagai "gotong royong digital" mencerminkan transformasi nilai lokal menjadi praktik kolaboratif dalam ekosistem digital. Lebih lanjut, dalam konteks global, kolaborasi digital juga menjadi solusi dalam menghadapi tantangan kompleks seperti bencana, pandemi, dan krisis sosial. Praktik berbagi data, *crowdsourcing*, dan *open collaboration* menunjukkan bahwa solidaritas kolektif dapat diperluas melalui teknologi digital. Namun, efektivitas kolaborasi ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan integritas individu dalam berbagi informasi. Tanpa adanya landasan nilai seperti *Sakai Sambayan*, kolaborasi digital berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, integrasi nilai gotong royong dalam pendidikan kewarganegaraan digital menjadi penting untuk membangun budaya kolaboratif yang bertanggung jawab.

Melengkapi dimensi kolaboratif tersebut, internalisasi nilai *Nemui Nyimah* menawarkan landasan etika komunikasi yang lebih humanis dengan menekankan pada aspek kesantunan, keterbukaan, dan empati dalam interaksi daring. Revitalisasi nilai tradisional ini menjadi mendesak sebagai instrumen

mitigasi terhadap krisis komunikasi digital yang saat ini terdistorsi oleh agresivitas, ujaran kebencian, dan *cyberbullying*. Dengan mengadopsi prinsip penghormatan terhadap sesama ke dalam ekosistem digital, warga negara didorong untuk membangun hubungan sosial yang positif serta berkomunikasi secara jujur dan bertanggung jawab. Secara empiris, penguatan kesadaran etis ini tidak hanya meningkatkan kualitas interaksi publik, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap infiltrasi informasi yang tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran etika dalam penggunaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiputra et al., (2022) menunjukkan bahwa komunikasi digital yang tidak etis dapat merusak hubungan sosial dan memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada literasi digital, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral dalam komunikasi. Dalam konteks ini, *Nemui Nyimah* dapat menjadi dasar dalam membangun etika komunikasi digital yang lebih humanis. Prinsip ini sejalan dengan konsep etika digital yang menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, bertanggung jawab, dan membangun hubungan sosial yang positif. Sebagaimana dinyatakan bahwa “*develop online communication ethics, communicate honestly, responsibly, and build positive relationships*” (Sari et al., 2024), komunikasi digital harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang mendukung terciptanya lingkungan digital yang sehat. Selain itu, dalam perspektif global, etika komunikasi juga menjadi bagian penting dalam mengatasi penyebaran disinformasi. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kesadaran etika yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan lebih mampu membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid (Pennycook & Rand, 2021). Dengan demikian, integrasi nilai *Nemui Nyimah* dalam pendidikan digital dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap disinformasi.

Seluruh struktur etika tersebut pada akhirnya berpijak pada nilai *Juluk Adek* yang memosisikan integritas dan kehormatan diri sebagai mekanisme kontrol moral primer dalam penggunaan teknologi. Di tengah tantangan anonimitas digital yang sering kali memicu pengikisan norma sosial, prinsip ini berperan vital dalam menjembatani kesenjangan antara identitas digital dan identitas sosial individu. Dengan memelihara marwah personal meskipun berada dalam ruang anonim, risiko degradasi moral serta penyalahgunaan data dapat diminimalisir secara signifikan sesuai dengan tuntutan etika teknologi yang bertanggung jawab. Secara holistik, internalisasi nilai-nilai *Piil Pesenggiri* ini tidak hanya menjaga martabat individu, melainkan juga mengukuhkan kepercayaan dan keberlanjutan ekosistem digital secara menyeluruh. Dalam konteks digital, *Juluk Adek* dapat diinterpretasikan sebagai prinsip integritas dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Salah satu tantangan utama dalam ruang digital adalah anonimitas, yang sering kali mendorong individu untuk bertindak di luar norma sosial. Anonimitas memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat tanpa konsekuensi langsung, sehingga meningkatkan risiko perilaku tidak etis seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan manipulasi informasi. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara identitas digital dan identitas sosial individu. Oleh karena itu, diperlukan nilai yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut, sehingga individu tetap menjaga integritasnya dalam ruang digital.

Dalam konteks ini, *Juluk Adek* berfungsi sebagai internalisasi nilai moral yang mendorong individu untuk tetap menjaga kehormatan dan tanggung jawab, meskipun berada dalam ruang anonim. Hal ini sejalan dengan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi, di mana individu dituntut untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan yang dilakukan. Sebagaimana ditegaskan penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan penyalahgunaan data dan penyebaran disinformasi (Atenas et al., 2023), integritas menjadi kunci dalam mencegah terjadinya degradasi moral digital. Selain itu, integritas juga berkaitan dengan kepercayaan dalam ekosistem digital. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam membangun interaksi sosial yang sehat, baik dalam dunia nyata maupun digital. Tanpa kepercayaan, kolaborasi dan partisipasi dalam ruang digital

akan sulit terwujud. Oleh karena itu, internalisasi nilai *Juluk Adek* tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi keberlanjutan ekosistem digital secara keseluruhan.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi nilai *Piil Pesenggiri* yang meliputi *Juluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, dan *Sakai Sambayan* menjadi fondasi *civic virtue* digital yang sangat krusial sebagai "benteng moral" untuk memitigasi disrupsi nilai serta mengatasi dominasi perspektif Barat yang cenderung teknis-yuridis. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dalam membumikan nilai-nilai luhur keindonesiaan ke dalam ekosistem global guna membangun karakter warga digital yang bertanggung jawab dan berintegritas. Sebagai implikasi praktis, kerangka etnopedagogi ini disarankan untuk diintegrasikan secara kontekstual ke dalam kurikulum pembelajaran PPKn guna memperkuat *civic virtue* generasi digital sekaligus menjaga keberlanjutan identitas nasional di ruang siber secara komprehensif. Akan tetapi, kajian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat studi konseptual (*library research*) yang bertumpu pada analisis teori. Dengan demikian, diharapkan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk melakukan uji empiris di lapangan, seperti penerapan metode pembelajaran, observasi perilaku digital, dan pengukuran keefektifitasan guna mengonfirmasi seberapa jauh kerangka *Piil Pesenggiri* dapat secara nyata menguatkan karakter dan moral peserta didik di dalam kelas dan dunia digital.

Referensi

- Adebayo Yusuf Balogun, A. Y., Alao, A. I., & Olaniyi, O. O. (2025). Disinformation in the digital era: The role of deepfakes, artificial intelligence, and open-source intelligence in shaping public trust and policy responses. *Computer Science & IT Research Journal*, 6(2), 28–48. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v6i2.1824>
- Afif, M. N., & Rahman, N. (2025). Integrasi nilai-nilai *piil pesenggiri* sebagai kearifan lokal dalam pembentukan karakter peserta didik di Lampung. *Advances in Education Journal*, 2(2), 917–922.
- Ahmadin, A., Noprianto, N., Ilham, M. J., Laadi, M. A., & Asmar, A. (2026). Transformasi nilai etika dan karakter Pancasila pada mahasiswa PPKn Untika Luwuk dalam arus digitalisasi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(1), 23–39.
- Ali, D. J., & Eriyanto, E. (2021). Political polarization and selective exposure of social media users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 268–283.
- Ardiansyah, S., Yorman, Y., & Rassyi, S. F. (2026). Digital citizenship education for good governance: A character-based approach rooted in local wisdom. *Innovations in Pedagogy and Technology*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.63385/ipt.v2i1.223>
- Aries, A. M. (2022). Peningkatan karakter gotong royong melalui *market day* di sekolah dasar. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 68–81.
- Atenas, J., Havemann, L., & Timmermann, C. (2023). Reframing data ethics in research methods education: A pathway to critical data literacy. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00380-y>
- Avalle, M., Di Marco, N., Etta, G., Sangiorgio, E., Alipour, S., Bonetti, A., Alvisi, L., Scala, A., Baronchelli, A., Cinelli, M., & Quattrociochi, W. (2024). Persistent interaction patterns across social media platforms and over time. *Nature*, 628(8008), 582–589. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07229-y>
- Chambers, F. C., Jones, A., Murphy, O., & Sandford, R. (2018). *Design thinking for digital wellbeing: Theory and practice for educators* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351265447>
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Dwiputra, R., Aziz, T. A., & Nur, M. (2022). Strengthening digital citizens' political communication ethics in social media. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 7(2), 51–56.
- Fachrudin, & Suharyadi. (1997). *Peranan nilai-nilai tradisional daerah Lampung dalam melestarikan lingkungan hidup*. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung.
- Fadhillah Quratul 'Aini, F. Q. A., Hasibuan, R. Y. A., & Gusmaneli, G. (2024). Pendidikan karakter

- sebagai landasan pembentukan generasi muda. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 54–69. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i4.3321>
- Fadia Puja Ainun, F. P. A., Mawarni, H. S., Fauzah, N. N., & Raharja, R. M. (2023). Peran pendidikan sebagai pondasi utama dalam menyikapi dekadensi moral pada generasi Z. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.1971>
- Handayani, D. W., Syafarudin, S., & Mufliah, L. (2021). Problem realisasi kebijakan smart city di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 35–62.
- Hashemi, M. (2023). Geographical visualization of tweets, misinformation, and extremism during the USA 2020 presidential election using LSTM, NLP, and GIS. *Journal of Big Data*, 10(1), 125. <https://doi.org/10.1186/s40537-023-00797-2>
- Hensmans, M. (2021). Exploring the dark and bright sides of internet democracy: Ethos-reversing and ethos-renewing digital transformation. *Technological Forecasting and Social Change*, 168, 120777. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120777>
- Hödl, T., & Myrach, T. (2023). Content creators between platform control and user autonomy. *Business & Information Systems Engineering*, 65(5), 497–519. <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00808-9>
- Hoes, E., Aitken, B., Zhang, J., Gackowski, T., & Wojcieszak, M. (2024). Prominent misinformation interventions reduce misperceptions but increase scepticism. *Nature Human Behaviour*, 8(8), 1545–1553. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01884-x>
- Isdiyanto, I. Y., Alwajdi, M. F., & Nur, M. (2023). The existence of *Kuntara Raja Niti* book in the value system of Lampung society in Pekon Marga Kaya. *Sosial Budaya*, 20(1), 1–13.
- Jost, J. T., Baldassarri, D. S., & Druckman, J. N. (2022). Cognitive–motivational mechanisms of political polarization in social-communicative contexts. *Nature Reviews Psychology*, 1(10), 560–576.
- Mane, S. S., Kundu, S., & Sharma, R. (2025). A survey on online aggression: Content detection and behavioral analysis on social media. *ACM Computing Surveys*, 57(7), 1–36.
- Manik, T. S., & Samsuri, S. (2021). Pendekatan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42–50.
- Marelić, M., Klasnić, K., & Vukušić Rukavina, T. (2024). Measuring e-professional behavior of doctors on social networking sites: Index construction with formative indicators. *JMIR Medical Education*, 10, e50156. <https://doi.org/10.2196/50156>
- Masitoh, M. (2019). Mengingat dan mendekatkan kembali nilai-nilai kearifan lokal (*piil pesenggiri*) sebagai dasar pendidikan harmoni pada masyarakat suku Lampung. *Edukasi Lingua Sastra*. <https://doi.org/10.47637/elsa.v17i2.41>
- Meythaler, A., Baumann, A., Krasnova, H., Hinz, O., & Spiekermann, S. (2023). Technology for humanity. *Business & Information Systems Engineering*, 65(5), 487–496. <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00831-w>
- Ni'mah, A. U., & Nurhidayati, T. (2025). Integrating local wisdom and Islamic values in digital literacy towards a just and tolerant society. *Proceedings of the International Conference on Education and Sharia*, 2(1), 60–69. <https://doi.org/10.62097/2025/6>
- Nurdin, B. V., & Utami, S. (2023). *Piil pesenggiri*: Study on leadership and public trust of the penyimbang adat in the indigenous Lampung community. *KnE Social Sciences*, 8(5), 325–341. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13008>
- Örtegren, A. (2024). Philosophical underpinnings of digital citizenship through a postdigital lens: Implications for teacher educators' professional digital competence. *Education and Information Technologies*, 29(4), 4253–4285. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11965-5>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388–402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Permana, I. K. A., Yasa, I. K. A. S., Saputra, I. K. A. D., & Sudwika, I. P. R. (2023). Citizenship in the digital age: Implications and challenges. *Journal of Digital Law and Policy*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v3i1.510>
- Putra, T. F., Anggraeni, L., Gufron, H., Juniarti, C., & Hardiyanti, R. A. (2024). Vernacular knowledge and digital citizenship: Integrating local wisdom in contemporary education. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 10(1), 127–136.

- Reisach, U. (2021). The responsibility of social media in times of societal and political manipulation. *European Journal of Operational Research*, 291(3), 906–917. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.020>
- Riadi, B. (2023). The values of local wisdom in Lampung folklore: A *piil pesenggiri* perspective. *Folklor/Edebiyat*, 29(114), 586–596. <https://doi.org/10.22559/folklor.2398>
- Rimanto, R., Hermanto, A., Arsyad, M., & Rohmawati, A. (2022). Examining *piil pesenggiri* philosophy of life concept in the context of religious moderation. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12445>
- Sakti, S. A., Endraswara, S., & Rohman, A. (2024). Revitalizing local wisdom within character education through ethnopedagogy approach. *Heliyon*, 10(10).
- Sari, H. B., Ningsih, N. M. A. P. C., Kristina, N. M. Y., Rismayanti, N. P. I., Thalib, E. F., Meinarni, N. P. S., & Julianti, L. (2024). Digital ethics and citizenship challenges in cyberspace. *Notariil Jurnal Kenotariatan*, 9(1), 33–39.
- Sasongko, W., Hamzah, H., Ramadhan, H. W., & Andreas, R. (2022). Model of social conflict settlement according to Lampung adat law. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sawitri, D. (2024). Integrating local wisdom in digital character education for primary learners. *SMART: Journal of Multidisciplinary Educational*, 2(1), 23–32.
- Shin, D., & Shin, E. Y. (2026). Cascading falsehoods: Mapping the diffusion of misinformation in algorithmic environments. *AI & Society*, 41(2), 1435–1452. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02575-5>
- Sinaga, R. M., Istiawati, N. F., & Adha, M. M. (2024). Incorporating local wisdom values of *piil pesenggiri* into life skills through social studies learning. *International Journal of Sustainable Social Science*, 2(5). <https://doi.org/10.59890/ijsss.v2i5.2594>
- Singh, S., & Kumar, S. (2025). Ethical and social issues of digitalization: Global perspective. *The Interdisciplinary Journal of Human and Social Studies*, 3(3), 15–33.
- Sjafirah, N. A., Indriani, S. S., Yanto, A., Sjachro, D. W., & Viannisa, N. (2024). Indonesian Sundanese local wisdom as an ethical reference in digital media. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), e06073. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-056>
- Suherlan, S. (2023). Digital technology transformation in enhancing public participation in democratic processes. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1(1), 10–17. <https://doi.org/10.61100/tacit.v1i1.34>
- Sun, L., Rao, Y., Wu, L., Zhang, X., Lan, Y., & Nazir, A. (2023). Fighting false information from propagation process: A survey. *ACM Computing Surveys*, 55(10), 1–38.
- Surjatmodjo, D., Unde, A. A., Cangara, H., & Sonni, A. F. (2024). Information pandemic: A critical review of disinformation spread on social media and its implications for state resilience. *Social Sciences*, 13(8), 418. <https://doi.org/10.3390/socsci13080418>
- Suardi, S., & Dinata, M. R. K. (2021). Pencegahan konflik masyarakat lokal dengan pendatang berdasarkan prinsip *nemui nyimah*. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1).
- Syahputra, M. C., & Ruslan, I. (2021). *Nemui nyimah*: Lampung local wisdom with religious moderation insight. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 26(1), 59–74.
- Weigl, L., Roth, T., Amard, A., & Zavolokina, L. (2024). When public values and user-centricity in e-government collide: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 41(3), 101956. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101956>